



## Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara

Dara Citra Pratiwi<sup>1</sup>, Imsar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[daracitra1021@gmail.com](mailto:daracitra1021@gmail.com) , <sup>2</sup>[imsar@uinsu.ac.id](mailto:imsar@uinsu.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 12 Mei 2022

Disetujui 16 Juli 2022

Diterbitkan 25 Juli 2022

### Kata kunci:

Bantuan sosial; Program Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); Kemiskinan; Dinas sosial

### Keywords :

Social assistance; Family Hope Program; Non-Cash Food Assistance; Poverty; Social services

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program jaminan sosial, khususnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Kabupaten Batu Bara bagi masyarakat layak atau tidak layak penerima dana bantuan yang disalurkan. Adapun tahapan penelitian yang digunakan dengan melakukan survei dan wawancara langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara. Selain itu melakukan tinjauan langsung ke lapangan dengan melakukan pendataan ke rumah masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian menyatakan sesuai dengan tanggapan dari gambaran kondisi di lokasi penelitian bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Batu Bara, dalam hal ini yang mengelola adalah Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara dinyatakan sudah sesuai prosedur, namun yang menjadi masalah adalah masih banyak masyarakat yang hidup miskin. Oleh karena itu harus melakukan pendataan kesesuaian data yang sebenarnya.

### ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of social security programs, in particular the Non-Cash Food Assistance (BPNT) and Family Hope Program (PKH) programs for communities in Batu Bara Regency for eligible or ineligible people who are recipients of the distributed aid funds. The stages of the research used were surveys and direct interviews with the Social Service of Batu Bara Regency. In addition, conducting direct field observations by collecting data on the homes of people who received Non-Cash Food Assistance (BPNT) and assistance for the Family Hope Program (PKH). The results of the study stated that in accordance with the response from the description of the conditions at the research location that the distribution of assistance carried out by the Batu Bara local government, in this case the manager of the Batu Bara Regency Social Service was declared to have followed the procedure, but the problem was that there were still many people living in poverty. . Therefore, it is necessary to collect data on the actual suitability of the data.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah di Kabupaten Batu Bara dimulai pada tahun 2012 dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk tunai dan sejak tahun 2018, bantuan sosial dalam bentuk bantuan pangan non tunai. (BPNT) disalurkan dalam bentuk barang, selama ini berupa sembako. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Batu Bara masih menimbulkan persoalan hingga saat ini. Terkait dalam sistem bansos di Kementerian Sosial ditemukan kendala seperti permasalahan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai alat transaksi sehingga tim bansos masih kesulitan dalam memberikan penyelesaian masalah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara memberikan sejumlah Program Bantuan yaitu bantuan komplementer yang lainnya seperti; Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), pendampingan untuk permasalahan pada anak dan bantuan untuk janda tidak mampu serta bantuan lainnya. Bantuan ini bersumber langsung dari Bupati atau Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara dengan sasaran warga tidak mampu yang bukan penerima bansos PKH dan BPNT. Penyelenggaraan bantuan sosial, yang dapat didefinisikan sebagai penyediaan dana jaminan sosial atau distribusi sosial untuk melindungi seseorang dari kehilangan pendapatan karena pengangguran, cacat, sakit, kematian dan hari tua. Bentuk bantuan sosial itu sendiri tidak boleh dalam

bentuk uang, tetapi bisa dalam bentuk barang atau jasa. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui ekonomi makro dapat dilakukan dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang tinggi. Pemerintah mengupayakan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui inisiatif ekonomi yang efektif, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu elektronik yang diterbitkan lembaga perbankan mandiri yang bekerjasama dengan atau laporan Agen E-Warong BPNT sebagai tempat penyaluran komoditi yang ditetapkan agar melakukan komunikasi dan koordinasi aktif kepada Dinas Sosial. Pengentasan kemiskinan harus didorong melalui strategi pengelolaan keuangan dan akses yang lebih baik ke bank (Rachman dkk., 2018).

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji pelaksanaan program jaminan sosial khususnya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara. Produktivitas pangan yang tidak stabil dan kenaikan harga membuat masyarakat tidak dapat mengakses pangan. Di sisi lain, kenaikan inflasi telah mengurangi pendapatan masyarakat miskin. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin perkotaan dan pedesaan (Suryana, 2014). Dengan cara ini, bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan di masyarakat, bahkan ketika mereka mendapatkan bantuan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda, bantuan yang mereka dapat juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi di balik itu masih sangat banyak masyarakat menggunakan bantuan tersebut kurang efektif misalnya dana bantuan digunakan untuk pergi jalan-jalan, membeli barang yang tidak tepat guna, sehingga tingkat kemiskinan tidak menurun.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah dalam program bantuan sosial bagi keluarga miskin. Menurut Faturachman dan Marcelinus Molo (Matana, 2016), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan kelompok dalam suatu keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Begitu pula dengan proyek PKH. Tujuan utama PKH adalah menghasilkan tenaga kerja di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin. PKH merupakan proyek yang berjalan sejak tahun 2007. Melalui PKH, keluarga miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan menerima bantuan keuangan untuk jangka waktu terbatas. PKH membantu keluarga miskin mengakses dan memperoleh manfaat dari layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan dukungan. PKH merupakan langkah menjanjikan yang akan sangat membantu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk itu, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 2015-2019 (1) melindungi seluruh lapisan masyarakat. (2) mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dasar; dan (3) mempromosikan gaya hidup berkelanjutan (Bapenas, 2017).

Dalam penelitian ini terkait dengan manajemen strategis. Diketahui bahwa manajemen strategis adalah metode untuk mencapai tujuan perencanaan, pengembangan dan perencanaan, pengalokasian sumber daya, menggabungkan keberhasilan rencana dengan berbagai elemen fungsional badan untuk mencapai tujuan, visi dan misi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penyaluran bantuan sosial pemerintah mempunyai hubungan manajemen dalam rangka mewujudkan dukungan sosial dengan baik dan benar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat pula rumusan masalah: Bagaimana strategi pelayanan sosial dalam memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT)? Masyarakat Provinsi Batu Bara, bagaimana strategi dinas sosial Kabupaten Batu Bara dalam menghimbau masyarakat untuk menggunakan bantuan sosial secara efektif dan efisien demi mengurangi tingkat kemiskinan, serta bagaimana strategi dinas sosial Kabupaten Batu Bara dalam menyelesaikan masalah apabila terdapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai sistem bantuan sosial yang sering error.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer karena penelitian kualitatif deskriptif menginterpretasikan data yang berkaitan dengan kondisi sosial, serta munculnya realitas yang ada dan dampaknya terhadap lingkungan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan dari dinas sosial kabupaten Batu Bara dan dianalisis oleh peneliti melalui survei lapangan langsung dan konsep teoritis. Dari survei data Badan Pusat Statistik Batu Bara, kriteria penentuan kelayakan penerima bansos disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Batu Bara. Pemerintah telah

melakukan survei untuk menentukan kriteria kelayakan penerima dana bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan meningkat di negara bagian Batu Bara. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Batu Bara, persentase penduduk miskin jika dilihat dalam tiga tahun kebelakang terdapat peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 12,14% atau sebanyak 50.562 jiwa penduduk miskin dari total penduduk keseluruhan sebanyak 416.493,00 jiwa. Pada tahun 2020, angka kemiskinan menurun menjadi 11,88% atau 48.789 jiwa dari total penduduk keseluruhan sebanyak 410.678 jiwa. Pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan sebesar 12,38% atau sebanyak 51.151 jiwa dari total penduduk keseluruhan sebanyak 413.171 jiwa.



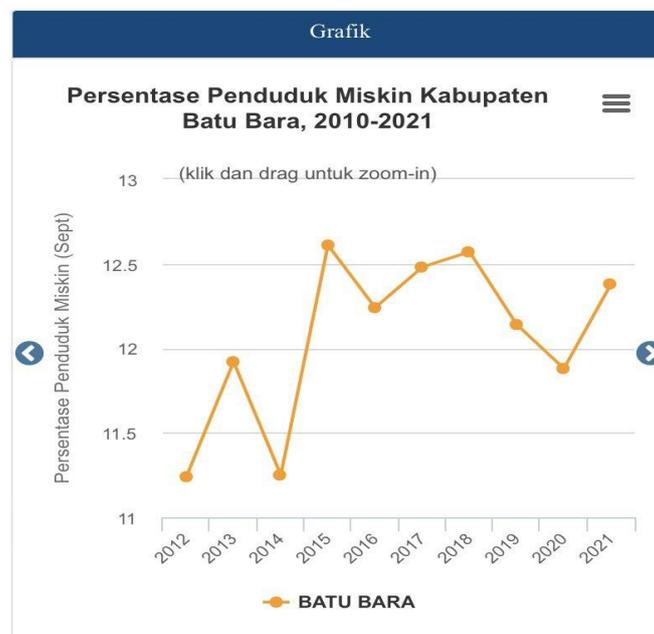
**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara (Jiwa) dari tahun 2019-2021  
Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara



**Gambar 2.** Jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara tahun 2010-2021  
Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara



**Gambar 3.** Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batu Bara (Jiwa) dari tahun 2019-2021  
 Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara



**Gambar 4.** Presentase penduduk miskin Kabupaten Batu Bara tahun 2010-2021  
 Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara

Di tahun Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi Covid-19 menciptakan kebutuhan untuk mereformasi sistem bantuan sosial Indonesia (BANSOS). Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Provinsi Batu Bara sedang dalam kondisi ekonomi yang terpuruk.

Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan sembako dan bantuan sosial finansial untuk menghadapi dampak Covid-19 melalui Keputusan Menteri Sosial No. 54-HUK.2020, ini menjadi angin segar untuk dunia bisnis dan masyarakat yang terkena wabah saat ini. Pada masa epidemi, banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, banyak pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut dipecat atau dipecah, sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saat terjadi wabah, masyarakat di Kabupaten Batu Bara sangat merasakan keterpurukan ekonomi. Akibat pandemi covid-19, bantuan yang mereka terima setiap 3 bulan sekali terhenti, yang menambah tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, diperlukan kerjasama, koordinasi dan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kepala daerah yang berperan penting dalam penyaluran bansos. Efektif. Berbagai program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah bantuan dana langsung (BLT), dana desa, bantuan sosial, sembako, bansos, pembebasan tagihan listrik, kartu prakerja, tambahan peserta Program Keluarga Harapan. (PKH) dan kartu sembako.

Dana bansos yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan sebagai modal usaha, baik itu usaha pribadi maupun kelompok agar dapat menambah penghasilan atau pendapatan untuk kelompok dapat dijadikan sebagai UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

### **Analisis Penyaluran Bantuan Sosial**

Untuk mengamati analisis dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT di tengah keadaan wabah corona pada saat ini yang keberadaannya terus mengalami peningkatan di Indonesia salah satunya di Kabupaten Batu Bara. Oleh karena itu, proses penyaluran bansos diukur dengan menggunakan 4 indikator menurut Budhiani, yaitu ketepatan, sosialisasi, tujuan program dan pemantauan (Amelia, 2015). Hal ini termasuk dalam konsep manajemen strategi yang harus diterapkan dalam melakukan penyaluran bantuan sosial.

#### **1. Ketepatan Sasaran**

Jika masyarakat negara Batu Bara ingin mendapatkan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), harus mengikuti prosedur administrasi yaitu bagi yang tidak mampu, maka informasi tersebut dicatat oleh Kepala Dusun, selanjutnya informasi tersebut akan dimasukkan oleh perangkat desa melalui penerapan sistem jaminan sosial generasi penerus (SIKS-NG), yang nantinya akan dimasukkan dalam bantuan PKH yang masuk dalam Informasi Jaminan Sosial Terpadu (DTKS) dalam pemantauan calon . ). Dan karena bansos PKH berbasis nama per alamat (BNBA) kepada masyarakat, maka dibuat relevan dan akurat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Sesuai jadwal yang dikeluarkan Kemensos melalui Bank Penyalur, proses pencairan dana hibah PKH langsung masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PHH setiap tiga bulan sekali. Selanjutnya KPM PKH boleh melakukan transaksi dimana dan kapan saja dan di monitoring oleh pendamping PKH untuk memastikan saldo sudah masuk dan tepat jumlahnya.

Kemudian sistem/proses penyaluran bantuan sosial berupa BPNT yaitu dimanfaatkan di E-Warung BPNT Agen Bank Mandiri yang terdaftar di Kemensos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam bentuk komoditi sembako menyesuaikan nominal besaran bantuan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan berdasarkan By Name By Address (BNBA). Dalam sistem bansos di Kementerian Sosial masih ditemukan kendala seperti inclusion error (data tidak layak dari yang ditetapkan) dan exclusion error (data layak namun belum masuk dalam daftar penerima yang ditetapkan) namun Pemerintah Kabupaten Batu Bara setiap saat mengoptimalisasikan data kepenerimaan agar layak dengan cara up-date setiap saat melalui operator SIKS-NG baik tingkat Kabupaten dan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya di Kabupaten Batu Bara mengenai ketepatan sasaran program bantuan sosial berupa PKH dan BPNT sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## 2. Sosialisasi Program

Sebelum masuk program bantuan tentunya dilakukan sosialisasi, pada tahap ini masyarakat diberikan informasi tentang program bantuan sosial (PKH dan BPNT) yang diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Proses masyarakat merupakan proses penting dalam menjalankan program. Karena masyarakat jelas tahu tentang apa program ini. Dan dimensi ini mengukur tingkat kesadaran pemerintah tentang program bantuan sosial berupa PKH dan BPNT. Di Kabupaten Batu Bara, sosialisasi program bansos PKH dilakukan melalui pertemuan kelompok melalui pendamping PKH. Setiap desa memiliki pendamping PKH agar masyarakat dapat berkomunikasi atau menanyakan perihal bantuan PKH dengan jelas bersama Pendamping Desa masing-masing. Sedangkan program bantuan sosial berupa BPNT mengenai sosialisasi dilakukan dengan membentuk Tim Koordinasi (Tikor) BPNT yang telah diberi Surat Keterangan (SK) tugas oleh Bupati Kabupaten Batu Bara sejak tahun 2019 yang terdiri dari Tim Koordinasi (Tikor) Kecamatan dan Kabupaten yang diisi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan unsur penegak hukum. Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya di Kabupaten Batu Bara, pelaksanaan sosialisasi program bantuan sosial berupa PKH dan BPNT sudah dilakukan sesuai strategi yang baik agar masyarakat mengetahui kegunaan serta manfaat dari bantuan sosial pemerintah tersebut.

## 3. Pemantauan Program

Tujuan utama dari program dukungan sosial ini adalah bagaimana menemukan dan melihat kecocokan antara hasil pernyataan program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti mengatakan bahwa tujuan dari program bantuan sosial PKH dan BPNT adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memutus mata rantai, serta meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, untuk mengubah perilaku tidak membantu. Tujuan khusus PKH adalah untuk memfasilitasi akses peserta PKH ke pendidikan dan meningkatkan kesehatan dan gizi. Dan sesuai pedoman Program Pangan Pokok Kementerian Sosial, tujuan khusus BPNT adalah untuk menekan biaya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan.

Monitoring adalah tindakan memantau pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengidentifikasi masalah yang muncul serta mengambil tindakan sesegera mungkin. Tujuan pemantauan adalah untuk mengamati/mengetahui kemajuan proses, identifikasi dan masalah serta upaya penyelesaiannya. Dalam sistem pemantauan program bantuan sosial PKH di Kabupaten Batu Bara yaitu melalui monitoring dan rapat koordinasi internal SDM PKH Batu Bara dan laporan rekonsiliasi pendamping PKH. Sedangkan bantuan sosial berupa BPNT di Kabupaten Batu Bara yaitu dengan cara diperlukan kerja sama atau laporan dari E-Warong BPNT Agen Bank Mandiri sebagai tempat Penyaluran Komoditi yang ditetapkan, agar melakukan komunikasi dan koordinasi aktif kepada Dinas terkait melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pendamping sembako di masing-masing kecamatan baik tentang permasalahan KPM yang ditetapkan namun mengalami kendala serta komitmen memberikan pelayanan komoditi yang layak kepada para penerima manfaat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil serta ulasan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya meskipun pada tahun 2019 terjadi peningkatan kemiskinan, tahun 2020 terjadi penurunan kemiskinan, dan di tahun 2021 kembali terjadi peningkatan kemiskinan tetapi analisis penyaluran bantuan sosial nya sudah sesuai prosedur. Yang menjadi peningkatan pada tahun 2021 dikarenakan lamanya pandemi covid-19 sehingga Pemerintah Sosial menyalurkan bantuan. Penyaluran bantuan sosial pemerintah berupa PKH dan BPNT di Kabupaten Batu Bara sudah cukup terealisasikan dengan baik. Karena dari proses administrasi, proses sosialisasi dan proses penyalurannya pun sudah sesuai dengan prosedur dari pemerintah pusat, sehingga bantuan sosial tersebut benar-benar diperuntukkan kepada masyarakat di Kabupaten Batu Bara. Terlebih lagi sosialisasi dengan tujuan memperkenalkan bantuan sosial kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial Batu Bara agar masyarakat dapat memahami bagaimana mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan ketika telah mendapatkan bantuan. Serta masing-masing desa telah diberikan satu pendamping PKH dan BPNT agar masyarakat dapat diatur dengan baik dan juga berkomunikasi dengan warga yang manakala masih ada yang kurang paham mengenai bantuan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makasar. Skripsi (Internet). Di Unduh Pada 28 Maret 2016. Tersedia Pada <https://Repository.Unhas.Ac.Id/Bistream/Handle/123456789/14610/SKRIPSI%20RIZCAH%20AMELIA.Pdf> 1-111.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara. Statistik Indonesia. 2010-2021. <https://Batubarakab.Bps.Go.Id/>
- DEWI, A. N. (2022). Eksistensi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Dengan Pendekatan Maqashid Syariah.
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Dwita Agustina, Suci Megawati. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Publika*, 10(1), 175-190.
- Fadhila, Dkk. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, *Jurnal Politikom Indonesia*, 6(1) 46-47
- Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Publika*, 407-418.
- Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 39-53.
- Matana, T.R (2016). Faktor Penyebab Penduduk Miskin Di Kecamatan Lage. *Jurnal Ekomen*, 16(1), 68-77
- Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh PKH Dan BPNT Terhadap Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 3(1), 12-24.
- Nugraha, Hadi. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 790-791
- Rayadi. (2016). Analisis Sistem Penyaluran Bantuan Ke Desa Pada Lingkungan Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal Eksos*, 9(1), 85-96
- Rizka, Shella. (2021). Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Desease (Covid-19) Di Provinsi Gorontalo. *Journal Of Management*, 4(3), 157-164.
- Suryana. (2014). *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- WULAN, S. (2022). Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Antara Harapan Dengan Kenyataan (Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).